

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Imam Fitroni (2018) berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Lamongan (Studi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup)”**. Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi jurusan Ilmu Administrasi Publik Minat Perencanaan Pembangunan Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Lamongan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sinergi dan koordinasi antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga program pengelolaan sampah belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Lamongan meningkatkan kerja sama dengan masyarakat, aktivis lingkungan, dan LSM dalam pengelolaan sampah serta

menambah alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur persampahan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Hendra Budiman (2024) berjudul **“Implementasi Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru”**. Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai kerangka analisis dalam melihat pelaksanaan pengelolaan sampah oleh bank sampah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus berperan dalam membantu pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengurangi volume sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Bank sampah ini juga melakukan kegiatan pengolahan dan daur ulang sampah menjadi berbagai produk seperti tas, keranjang, dan kerajinan dari bahan plastik maupun kertas. Namun, implementasi program ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti

rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bank sampah serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah melalui bank sampah sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat, sosialisasi yang efektif, serta penguatan sumber daya dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Untuk menempatkan penelitian ini, penulis menyajikan perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya namun penelitian ini lebih mengarah pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel perbandingan penelitian.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Teguh Imam Fitroni (2018) Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu administrasi	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Lamongan (Studi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Dinas	Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan belum berjalan optimal, disebabkan kurangnya sinergi dan	Sama-sama meneliti implementasi kebijakan pengelolaan sampah menggunakan teori Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi).	Lokasi penelitian berbeda; subjek penelitian terdahulu berfokus pada dinas pemerintah kabupaten (Dinas Perkim dan DLH), sedangkan penelitian

		Lingkungan Hidup)	koordinasi antar dinas serta keterbatasan sarana dan prasarana seperti TPS dan TPA.		sekarang berfokus pada implementasi peraturan daerah di tingkat pemerintah desa.
2.	Fajar Hendra Budiman (2024), Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau Jurusan Administrasi Negara	Implementasi Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	Hasil penelitian menunjukkan Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus berperan membantu pemerintah kota mengurangi volume sampah, namun implementasinya masih menghadapi kendala rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat.	Sama-sama meneliti implementasi pengelolaan sampah menggunakan teori Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi).	Lokasi penelitian berbeda objek penelitian terdahulu adalah lembaga bank sampah (organisasi masyarakat, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada implementasi peraturan daerah oleh pemerintah desa.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik menurut Carl Freadrich dalam Joko Pramono (2020:30-31) yang mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana

terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye dalam Siti Marwiyah (2022:12) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”.

Menurut James E Anderson dalam Anirwan (2025: 27) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah: “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”. (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Menurut David Easton dalam Sahya Anggara (2018:35), “*Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*” (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

Menurut Nurcholis dalam Irawaty Igrisa (2022:32), memberikan definisi tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam:

- a. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit organisasi pelaksana kebijakan),
- b. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

b. Jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson dalam Siti Marwiyah (2022:13-14) menyampaikan bahwa kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1) Kebijakan *substantif* dan kebijakan *procedural*

Kebijakan substantif merupakan kebijakan yang menyangkut dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan kebijakan prosedural merupakan bagaimana kebijakan dijalankan.

2) Kebijakan *distributive*, kebijakan *regulatori* dan kebijakan *redistributive*

Kebijakan distributif merupakan distribusi pelayanan atau pemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3) Kebijakan material dan kebijakan simbolik

Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya secara detail pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.

4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat

Kebijakan barang umum merupakan kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

c. Proses kebijakan Publik

Proses kebijakan publik menurut William Dunn (2017) dalam Irawaty Igrisa (2022:35-37), adalah sebagai berikut:

- 1) *Agenda Setting* adalah suatu proses mengupayakan agar suatu masalah publik berubah menjadi agenda kebijakan dan agenda pemerintah. Termasuk didalam hal ini adalah perumusan masalah - memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah;
- 2) *Forecasting* (peramalan) adalah memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dengan diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan;

- 3) Adopsi kebijakan (*Policy Adoption*) yaitu sebuah kebijakan diadopsi karena adanya dukungan mayoritas anggota dewan, adanya konsensus di antara pimpinan lembaga, atau adanya keputusan mayoritas.
 - 4) Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*), yaitu kebijakan yang diadopsi dilakukan oleh badan/lembaga teknis pemerintah dengan memobilisasi sumber daya keuangan dan manusia untuk melaksanakan kebijakan.
 - 5) Penilaian Kebijakan (*Policy Assessment*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga audit pemerintahan dalam menentukan apakah kebijakan eksekutif, tindakan legislatif, dan keputusan pengadilan sesuai dengan persyaratan undang-undang dalam mewujudkan tujuannya.
 - 6) Adaptasi kebijakan (*Policy Adaptation*) adalah Hasil audit dan evaluasi dari lembaga audit dilaporkan kepada lembaga yang bertanggung jawab untuk merumuskan, mengadopsi, dan menerapkan kebijakan bahwa peraturan yang ditulis dengan buruk, sumber daya yang tidak memadai, dan pelatihan yang tidak memadai memerlukan adaptasi kebijakan.
- d. Aktor-aktor Kebijakan Publik
- Menurut Leo Agustino (2017:28-48) aktor kebijakan publik terbagi menjadi dua kategori yaitu :
- 1) Aktor Negara

Aktor atau pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam memformulasi hingga menetapkan sebuah kebijakan. Merujuk pada kehidupan nyata, aktor pembuat kebijakan adalah: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
 - 2) Aktor Non-Negara

Ada beberapa aktor non-negara yang juga terlibat (secara langsung maupun tidak langsung) dalam proses kebijakan. keterlibatan atau partisipasi mereka dalam proses kebijakan terutama dalam memberikan masukan terhadap formulasi dan implementasi kebijakan. Beberapa aktor non-negara yang diidentifikasi sering berpartisipasi dalam proses kebijakan publik adalah: kelompok kepentingan dan kelompok penekan, partai politik, media massa, dan warga negara secara pribadi.

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi kebijakan

Menurut Kusumanegara dalam Ibrahim Kristofol Kendi (2024:1) implementasi diartikan sebagai output, yaitu melihat aktivitas

dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau mengalami penyimpangan.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*), maupun sebagai hasil (Chazali H. Situmorang 2016:173-74).

Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2019:128) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Joko Pramono (2020:3) mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Pressman dalam H. Mukhtar Mas'ud, Bahtiar, Abd. Rahman (2022:13) menyatakan bahwa implementasi, adalah proses interaksi antara rumusan tujuan dan tindakan yang telah disesuaikan untuk mencapainya seperti halnya sebuah kemampuan untuk menempa urutan hubungan dalam rantai sebab akibat agar diperoleh hasil yang diketahui.

Menurut Joko Widodo dalam Rahayu Kusuma Dewi (2016:155) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

b. Teori Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward III

Teori George C. Edward III dalam Joko Pramono (2020:4-5) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Joko Pramono (2020:6) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program di dukung oleh sumberdaya yang memadai.

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Joko Pramono (2020:7) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi

keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn dalam Joko Pramono (2020:8) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

c. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Menurut M. Irfan Islamy dalam Siti Marwiyah (2022:37) untuk mengefektifkan kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk yaitu:

- 1) *Self-executing*, yaitu bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasi dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu Negara terhadap kedaulatan Negara lain.
- 2) *Non self-executing*, yaitu bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

d. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn dalam Siti Marwiyah (2022:42-43), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber kebijakan
- 3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan
- 4) Karakteristik badan pelaksana
- 5) Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- 6) Kecenderungan para pelaksana

Menurut Bambang Sunggono dalam Siti Marwiyah (2022:43-44), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- 1) Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak

cukup terperinci, sarana dan penerapan prioritas, atau program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan kaitannya dengan sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4) Pembagian Potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.

3. Sampah

a. Pengertian Sampah

Sampah merupakan material sisa hasil aktivitas yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu dalam industri maupun rumah tangga. Dapat dikatakan sampah adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia setelah proses dan penggunaannya berakhir.

Menurut KBBI, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sedangkan menurut UU Nomor 18 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

b. Jenis-jenis Sampah

1) Sampah Organik

Sampah organik adalah material yang dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme dan berasal dari makhluk hidup. Contoh: Sisa makanan, kulit buah, sayuran, dan limbah kebun seperti daun dan ranting. Pengelolaan: Sampah organik dapat diolah melalui proses komposting untuk menghasilkan pupuk alami yang bermanfaat bagi tanah.

2) Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah bahan yang tidak terurai secara alami dan biasanya berasal dari proses industri. Contoh: Plastik, kertas, logam, kaca, dan bahan lain yang terbuat dari bahan sintetis. Pengelolaan: Sampah anorganik dapat didaur ulang untuk membuat produk baru, mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru dan mengurangi jumlah sampah di tempat pembuangan akhir.

3) Sampah Berbahaya (B3)

Sampah berbahaya adalah sampah yang mengandung bahan atau senyawa yang, jika tidak dikelola dengan benar, dapat

menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia atau lingkungan. Contoh: Baterai, lampu neon, bahan kimia rumah tangga, limbah medis, dan pestisida. Pengelolaan: Sampah B3 memerlukan penanganan khusus dan seringkali melibatkan pembuangan atau pengolahan yang aman untuk mencegah dampak negatifnya.

4) Sampah Khusus

Sampah khusus adalah kategori sampah yang memerlukan prosedur pengelolaan dan penanganan yang berbeda dari sampah umum. Contoh: *E-waste* (sampah elektronik), limbah konstruksi, dan sampah dari produksi industri. Pengelolaan: Sampah khusus seringkali memerlukan teknologi dan metode pengelolaan yang khusus untuk memastikan bahwa prosesnya tidak merugikan lingkungan atau kesehatan.

c. Sumber-Sumber Sampah

1) Rumah Tangga

Sumber sampah terbesar dalam kehidupan sehari-hari berasal dari aktivitas rumah tangga, termasuk sisa makanan, kemasan, dan barang-barang rumah tangga yang tidak lagi digunakan.

Pengelolaan: Pengurangan penggunaan barang sekali pakai, komposting sisa makanan, dan pemilahan sampah untuk daur ulang adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah rumah tangga.

2) Industri

Aktivitas industri menghasilkan berbagai jenis sampah, termasuk limbah produksi, bahan kemasan, dan produk yang sudah tidak digunakan.

Pengelolaan: Pengelolaan sampah industri melibatkan pengolahan limbah yang efisien, daur ulang bahan-bahan industri, dan meminimalan limbah produksi.

3) Komersial

Sektor komersial, termasuk ritel, restoran, dan kantor, menghasilkan sampah yang terdiri dari kemasan produk, sisa makanan, dan barang-barang yang sudah tidak digunakan.

Pengelolaan: Pengelolaan sampah komersial seringkali melibatkan pemilahan untuk daur ulang, pengelolaan sisa makanan, dan implementasi kebijakan pengurangan sampah.

4) Konstruksi dan Renovasi

Proyek konstruksi dan renovasi menghasilkan sampah berupa material bangunan, sisa-sisa konstruksi, dan bahan yang tidak terpakai.

Pengelolaan: Pengelolaan sampah konstruksi melibatkan daur ulang material bangunan, pengurangan limbah selama proyek, dan pembuangan yang aman.

4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan.

Proses ini mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R)

Berdasarkan Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah di Indonesia dibagi menjadi dua, pertama yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan kedua yaitu pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing.

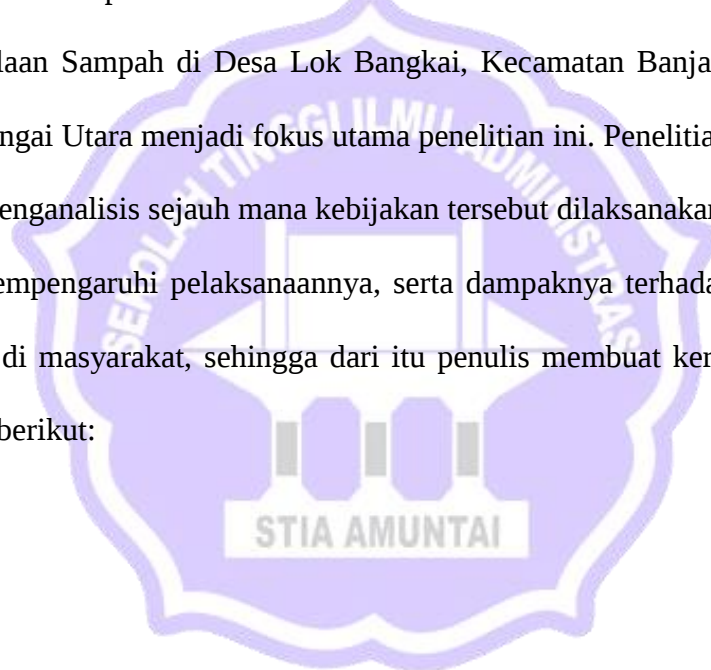
Kegiatan penanganan sampah meliputi : pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifatnya; pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu; pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA; pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Agung Edy Wibowo (2021:67) Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi

dan telaah kepustakaan. Kerangka pemikiran menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan kepada pembaca mengapa mempunyai anggapan seperti Hipotesis. Kerangka berpikir disajikan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan serta keterkaitan antar variabel yang diteliti.

Setiap kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah, perlu dilandasi oleh kerangka pemikiran agar penelitian dan penulisan laporan tersusun secara sistematis. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang menjadi acuan dalam melihat bagaimana implementasi kebijakan tersebut di tingkat desa. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Lok Bangkai, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap pengelolaan sampah di masyarakat, sehingga dari itu penulis membuat kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

